BAB VI

PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan proyek yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini juga akan memuat saran kepada pihak konsultan dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Strategis Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada Kawasan Strategis Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

- a) Secara umum proses pelaksanaan kegiatan mengalami kemunduran jadwal yang cukup panjang, hal ini disebabkan karena:
 - Kurang jelasnya pelaksanaan jadwal kerja yang diberikan oleh pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bagi konsultan dalam pelaksanaan proyek, misalnya saja terkait pelaksanaan proyek.
 - Kurang jelasnya orang-orang pelaksana proyek, baik dari tim teknis internal (Konsultan), maupun eksternal (tim dari kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
 - Kurangnya koordinasi antara Konsultan dengan Pemerintah Daerah
- b) Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia dalam konsultan perencana, baik tenaga ahli planologi ataupun surveyor yang menangani proyek. Sehingga tenaga ahli planologi harus menangani beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan.
- c) Pembagian kerja staf kurang sesuai dengan yang tertera pada KAK. Sebab tenaga ahli juga harus merangkap sebagai surveyor dalam beberapa proyek yang berbeda.
- d) Secara umum kunci analisis yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah menetapkan sektor unggulan, yang dicari dengan metode pehitungan LQ.
- e) Penetapan sektor unggulan juga sudah berupaya dilakukan dengan mengintegrasikan antara satu analisis dengan analisis lainnya, sehingga perumusan sektor unggulan dapat lebih teruji dan lebih mantap.
- f) Dari penetapan sektor unggulan tersebut kemudian dapat dicari analisis-analisis lanjutan, seperti analisis usaha lokal, analisis pengembangan sistem, analisis

kebutuhan infrastruktur, dan analisis kelembagaan, untuk pengembangan ekonomi dalam KSK di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.

- g) Selain analisis komoditas unggulan, analisis lainnya merupakan analisis kualitatif, yang didapatkan dari hasil turunan analisis komoditas unggulan, pendekatan kebijakan, dan hasil *Focus Group Discussion* antara Konsultan dengan Pemerintah Daerah.
- h) Metode yang digunakan adalah FGD, yang mana merupakan metode untuk menggali kebutuhan masyarakat daerah secara partisipatif, karena dianggap Pemerintah Daerah yang mengetahui kebutuhan pembangunana di daerahnya.
- i) Pada dasarnya kegiatan pelaksanaan pendampingan ini merupakan dokumen rencana yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat (bantuan teknis) guna mengentaskan kemiskinan dan mengangkat potensi ekonomi lokal.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa saran yang dapat diberikan pada pihak konsultan antara lain:

- a) Sebaiknya pihak konsultan dalam mengambil proyek mempertimbangkan jumlah sumberdaya manusia yang mereka miliki, sehingga tiap tenaga ahli tidak memiliki beban berlebihan dalam menangani proyek, sehingga hasil proyek diharapkan dapat lebih maksimal.
- b) Sebaiknya apabila terdapat jadwal, sistem pelaporan, atau hal lain terkait proyek yang belum jelas, pihak konsultan segeramemastikan kepada pemberi proyek.
- c) Meskipun hanya berupa rencana pendampingan, namun keberadaan peta sangat penting. Sehingga akan memberikan gambaran spasial sektor unggulan kawasan yang nantinya akan mempermudah pihak konsultan dalam melakukan analisis dan memeberikan rekomendasi terkait pengembangan sarana prasarana pada kawasan kajian.